

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- . *Merajut pemikiran dalam dunia notaris & PPAT*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- . *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib, dan Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. *Contoh-contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa*. Cetakan Pertama, Mei 2022. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta, t.t.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anand, Ghansham. *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2018.
- Andasasmita, Komar. *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Cetakan VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bakhri, Syaiful. *Beban pembuktian dalam beberapa praktik peradilan*. Gramata Publishing, 2012.
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan melawan hukum: pendekatan kontemporer*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum waris adat*. Cet. 7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama Hindu, Islam*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kohar, A. *Notariat Berkomunikasi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum notariat di Indonesia: suatu penjelasan*. Ed. 1, cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Prajitno, A. A. Andi. *Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa notaris di Indonesia?* Cet. 1. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Pramono, Dedy. *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. t.t.
- Rismiyanto, P. L. *Implementasi Klausula Proteksi Diri dalam Akta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Satrio, J. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedl*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Cet. ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sumardjono, Maria S.W. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Edisi revisi. Yogyakarta: Bahan Kuliah, 2019.
- . *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- . *Penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria dari Masa ke Masa*. Jakarta: Kompas, 2020.
- Susanto, Herry. *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 954)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (2010).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 perihal Kewajiban Notaris dalam Mencatat Keterangan Penghadap, 5 September 1973.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975 perihal Cacat Formil Gugatan Akibat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Perkara Perdata, 13 Mei 1975.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 303 K/Pid/2004 perihal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (surat kuasa menjual) oleh Notaris dan Pelanggaran Prosedur Jabatan, 31 Agustus 2004.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 perihal Cacat Formil Gugatan Akibat Ketidaklengkapan Pihak yang Memiliki Kepentingan Langsung dalam Perkara Perdata, 14 Maret 2006

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010 perihal Tindak Pidana Pemasukan Keterangan Palsu (status hubungan suami isteri penghadap) ke dalam Akta Autentik oleh Notaris dan Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Umum, 29 Juni 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Kewajiban Izin Majelis Pengawas Daerah dalam Proses Peradilan, 28 Mei 2013.

Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 47/Pdt/2024/PT Mdn perihal Keabsahan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris, 20 Februari 2024..

D. Jurnal

Adnyana, I Gusti Ngurah. “Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (April 2022): 49-56. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>.

Asfiati, Siti Khanifah. “Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materiil Di Setiap Pembuatan Akta.” *Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 21–29. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art3>

Afinnas, Muhamad Agil Aufa. “Signifikansi Pengaturan Strict Liability Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Untuk Mengatasi Kerancuan Konseptualnya Dalam Praktik.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual FH UII* (November 2024): 60–71. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/36973>.

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak

Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 2021): 130–40.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/324>.

Damanik, Purba, dan Ikhsan. “Penggunaan Klausula Disclaimer Pada Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 385 K/Pid/2006).” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (November 2024): 4743–4755.
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1356/1487>

Dzulqarnain, Salsabilla, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu.” *Notarius* 17, no. 2 (Agustus 2024): 1051–68.
<https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.51265>

Fauzia, Praninditya Estri. “Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang Dibuat oleh Notaris sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 3 (Maret 2025): 1939-1950.
<https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1346/1250>

Muhamad, Giffari Yahya, dan Suparjo. “Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris dengan Objek Warisan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang Berada di Luar Wilayah Jabatan Notaris.” *The Juris* 5, no. 2 (Desember 2021): 193-200.
<https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.290>

Nurhadi, Dedi. “Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris.” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (Desember 2024): 191–204.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2980>

Nurmayanti, Rizki, dan Akhmad Khisni. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Koperasi.” *Jurnal Akta* 4, no. 2 (Desember 2017): 609-623.
<https://media.neliti.com/media/publications/324965-peran-dan-tanggung-jawab-notaris-dalam-p-f73dce55.pdf>.

Permadi, Iwan, Muhamad Yahya, dan Irsyadul Muttaqin. “Problematika Penghapusan Golongan Penduduk Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Maret 2024): 314–24.
<https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.8798>

Raymond, dan Benny Djaja. “Wewenang Notaris dan Tata Cara Pembuatan Akta

Pembagian Waris.” *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 2 (Februari 2023): 1366-1371.

<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.393>.

Rhiti, Hyronimus. “Tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.” *Justitia et Pax* 31, no. 2 (Oktober 2017). 27-55
<https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1343>

E. Internet

Admin. “Pembebasan Direksi dari Tanggung Jawab dalam Perspektif Pidana dan Perdata.”

<https://kliklegal.com/pembebasan-direksi-dari-tanggung-jawab-dalam-perspektif-pidana-dan-perdata/>

(diakses 6 Desember 2025)

“Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Persidangan Perdata.”

<https://portalhukum.id/hukum-perdata/kekuatan-pembuktian-akta-otentik-dalam-persidangan-perdata>

(Diakses 22 November 2025)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Sistem Informasi Elektronik

Monitoring Notaris (siEMON)." Diakses 9 Januari 2026.

<https://siemon.kemenkum.go.id/>.

F. Tesis

Hutapea, Wrendy Hasian. “Kajian Yuridis Pemungutan Pajak terhadap Proses Turun Waris Sehubungan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).” Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.

Kansil, Selvy Agustin. “Realisasi Pembagian Warisan Bagi Perempuan Tionghoa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kota Samarinda.” Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.

Nugroho, Bimo Otik Fajar. “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi.” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2024.

Rismiyanto, Prabowo Ludfi. “Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris.” Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/18088>. 2019.

Setiawan, Krisna Agung. “Implementasi Pembuatan Surat Keterangan Waris Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten

Kulonprogo” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), 2022

Verawati, Refi. *”Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Warisan melalui Akta Pembagian Waris (APW) dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di Kota Yogyakarta.”* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 2015.

G. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses 14 November 2025. <https://kbbi.web.id/>

Salim, Peter. *Salim’s Ninth Collegiate English–Indonesian Dictionary*. Edisi ke-4. Jakarta: Modern English Press, 2007.